

SKRIPSI
PENDIDIKAN POLITIK MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(STUDI KASUS: STRATEGI PENGEMBANGAN MAHASISWA NON FISIP
DI KOTA MAKASSAR)



Disusun Oleh:

MUH. MAR'IE RAFIUDDIN

E11116312

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENDIDIKAN POLITIK MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(STUDI KASUS: STRATEGI PENGEMBANGAN MAHASISWA NON FISIP
DI KOTA MAKASSAR)

Di susun oleh :

MUH. MAR'IE RAFIUDDIN

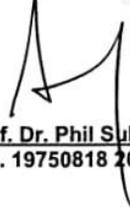
E11116312

Dinyatakan memenuhi syarat dan siap diperhadapkan dengan tim penguji

Pada tanggal : 03 AGUSTUS 2023

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si
NIP. 19750818 200801 1008

Pembimbing II



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 19731122 200212 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD
NIP. 19621231 199003 1023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PENDIDIKAN POLITIK MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(STUDI KASUS: STRATEGI PENGEMBANGAN MAHASISWA NON-
FISIP DI KOTA MAKASSAR)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH. MAR'IE RAFIUDDIN

E11116312

**Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Phill Sukri, M.Si. (.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Imran, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Mar'ie Rafiuddin

NIM : E11116312

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pendidikan Politik melalui Lembaga Kemahasiswaan, Studi kasus: Strategi Pengembangan mahasiswa Non-Fisip di Kota Makassar" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Agustus 2023

Muh. Mar'ie Rafiuddin



ABSTRAK

Muh. Mar'ie Rafiuddin. NIM E11116312. Pendidikan Politik Melalui Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus: Strategi Pengembangan Mahasiswa Non Fisip Di Kota Makassar). Di bawah bimbingan Bapak Sukri dan Bapak Andi Naharuddin.

Pendidikan politik merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis. Permasalahan pendidikan politik ini menarik perhatian dikarenakan terdapat ketidak seimbangan antara pembangunan politik, khususnya sosialisasi politik dengan pembangunan ekonomi di dalam pembangunan nasional yang dalam prosesnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik. keberadaan organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi strategis dalam pengembangan mahasiswa agar mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan secara baik, termasuk pengetahuan tentang wacana politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman organisasi mahasiswa terkait pendidikan politik serta mengetahui strategi pembaharuan pendidikan politik di organisasi kemahasiswa di kota Makassar. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana persepsi dan pemahaman organisasi mahasiswa terkait pendidikan politik serta mengetahui strategi pembaharuan pendidikan politik di organisasi kemahasiswa di kota Makassar. Penulis berangkat dari konsepsi pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Konsep strategi dalam penerapan logika-logika penerapannya juga penulis gunakan sebagai bentuk penjelasan posisi penggunaan strategi organisasi kemahasiswaan non-FISIP dalam penerapan strateginya.

Dalam hasil penelitian ini menggambarkan organisasi kemahasiswaan non-FISIP mengembangkan pendidikan politik dalam bentuk yang paling dasar sesuai dengan pemahaman mereka. Berbeda dengan lembaga kemahasiswaan dalam ranah FISIP yang memahami dan menerapkan bentuk pendidikan politik secara luas sesuai dengan arti dari pendidikan politik. pemahaman akan pendidikan politik oleh anggota organisasi kemahasiswaan non-FISIP.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Organisasi, Kemahasiswaan, Lembaga Kemahasiswaan.

ABSTRACT

Muh. Mar'ie Rafiuddin. NIM E11116312. Political Education Through Student Organizations (Case Study: Non-Fisip Student Development Strategy in Makassar City). Under the guidance of Mr. Sukri and Mr. Andi Naharuddin.

Political education is something that is absolutely necessary for the life of a dynamic nation and state. The problem of political education attracts attention because there is an imbalance between political development, especially political socialization with economic development in national development which in the process is part of the political socialization process. the existence of student organizations has a strategic function in developing students to be able to master knowledge and skills well, including knowledge of political discourse.

This study aims to determine the perception and understanding of student organizations related to political education and to find out the strategy of renewing political education in student organizations in Makassar city. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to explain how the perceptions and understanding of student organizations related to political education and knowing the strategy of renewing political education in student organizations in Makassar city. The author departs from the conception of education put forward by Paulo Freire. The concept of strategy in the application of the logics of its application is also used by the author as a form of explanation of the position of the use of strategies of non-FISIP student organizations in the application of their strategies.

The results of this study illustrate that non-FISIP student organizations develop political education in the most basic form according to their understanding. In contrast to student organizations in the realm of FISIP that understand and apply a broad form of political education in accordance with the meaning of political education. understanding of political education by members of non-FISIP student organizations.

Keywords: Political Education, Political Socialization, Student Organization, Student Organization.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Nurlaela** dan Ayah penulis **Rafiuddin** yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti – hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada seluruh anggota keluarga yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan

kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik serta bapak **Haryanto, S. IP., M.A** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik.
3. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Andi Naharuddin, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci**

Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan khususnya prodi Ilmu Politik, serta staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2016 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juli 2023

Penulis

MUH. MAR'IE RAFIUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pendidikan dalam Perspektif Paulo Freire.....	8
2.2 Teori Logika Strategi.....	14
2.3 Skema Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 . Lokasi Penelitian.....	21
3.3 . Sumber Data Penelitian.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITAN.....	27
4.1 Kota Makassar.....	27
4.1.2 Sejarah Kota Makassar	31
4.2 Perguruan Tinggi di kota Makassar.	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
5.1 Pemahaman Mahasiswa non-FISIP tentang Pendidikan Politik.....	40

5.2 Bentuk Pengembangan Pendidikan Politik Organisasi Kemahasiswaan non-FISIP di kota Makassar.	52
5.2.1 Menyisipkan Pendidikan Politik dalam Proses Kaderisasi.	53
5.2.2 Membuat Kegiatan Menumbuhkan Semangat Demokrasi.	56
BAB VI PENUTUP	62
6.1. Kesimpulan.....	62
6.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis. Permasalahan pendidikan politik ini menarik perhatian dikarenakan terdapat ketidak seimbangan antara pembangunan politik, khususnya sosialisasi politik dengan pembangunan ekonomi di dalam pembangunan nasional yang dalam prosesnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik. Ketidak seimbangan yang dimaksudkan pada bagian ini merupakan efek dari partisipasi politik yang ditunjukkan tidak mencapai totalitas.

Sosialisasi politik wajib dijalankan sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai asas Negara. Hal di atas mutlak diperlukan untuk mematangkan konsep demokrasi yang sering didengung-dengungkan sebagai sebuah konsep yang sesuai dengan akar sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan politik sebagaimana yang dipaparkan oleh alfian¹ Pendidikan politik sebenarnya adalah proses sosialisasi politik yang dilalui anggota-anggota masyarakat dari kecil sampai dewasa. Pendidikan politik itu tidak hanya terbatas di bangku sekolah atau

¹ Affandi, F. N. (n.d.). Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. Halaman. 21

tempat lain. Tingkah laku yang ada sekarang dalam masyarakat, dengan sendirinya mempengaruhi proses pendidikan politik masyarakat atau proses sosialisasi politik nanti. Jadi umpamanya untuk menjadi pemimpin sekarang atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang seandainya dia bisa bergantung kepada mereka yang berkuasa tanpa memperhatikan kebutuhan untuk adanya pengikut, atau seandainya mereka yang berkuasa tanpa memperhatikan kebutuhan dengan hanya bisa andalkan backing orang yang berkuasa, maka akan melahirkan corak pendidikan politik yang seperti ini. Dengan kata lain akan lahir pemimpin-pemimpin yang selalu menjilat atau menggantungkan diri kepada mereka yang berkuasa bukan melayani masyarakat. Ini merupakan masalah saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keberadaan organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi strategis dalam pengembangan mahasiswa agar mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan secara baik, termasuk pengetahuan tentang wacana politik. Hal ini nantinya akan menimbulkan kesadaran politik yang baik dari mahasiswa, hal ini diperlukan suatu program organisasi yang berorientasi kepada peningkatan wawasan politik mahasiswa dan keterlibatan mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pembinaan politik. Peranan mahasiswa sangat dituntut untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan sejumlah kegiatan, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengetahuan agar semakin banyak dapat merespon fenomena-fenomena

politik secara baik. Kurangnya aktifitas politik di lembaga kemahasiswaan non fisip seperti demonstrasi dan diskusi diskusi yang membahas kebijakan pemerintah disebabkan karena lemahnya kesadaran politik.

Dalam catatan sejarah perjalanan kemahasiswaan, mahasiswa selalu hadir tidak sekedar sebagai saksi dari perubahan tetapi juga aktif dalam memaknai perubahan tersebut. Sejarah juga mencatat dengan tinta emas betapa mahasiswa Indonesia selalu menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perjuangan dari setiap aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. mahasiswa sebagai partisipan yang aktif dalam merekayasa setiap perubahan tidak dapat dipungkiri. Misalnya, kebangkitan nasional pada tahun 1908, sumpah pemuda pada tahun 1928, proklamasi pada tahun 1945 dan kebangkitan Orde Baru tahun 1966. Pola pergerakan mahasiswa mulai dari mahasiswa angkatan tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1977 dan mahasiswa angkatan 1978, baik yang berhasil dalam aksinya maupun yang kurang berhasil selalu berorientasi pada perubahan dari status quo ke suatu situasi baru yang setidaknya mengundang harapan baru pula.²

Gerakan mahasiswa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka mempunyai ciri yang berbeda. Kendatipun berbeda namun gerakan tersebut mempunyai satu nafas, yaitu ingin memperjuangkan kepentingan rakyat. Aksi-

² Tentang Boedi Oetomo, mengenai sifat dan tujuannya, lihat L.M Sitorus, Sejarah pergerakan Kebangsaan Indonesia, Jakarta: 1974, hal 10-11. Lihat juga Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, London: Cornell University Press, 1980, hal 80-81.

aksi mahasiswa tahun 1966, 1974, dan 1978 merupakan sejarah politik praktis mahasiswa untuk menunjukkan diri sebagai suatu kekuatan moral (moral force), pengabdian pada masyarakat luas. Aksi-aksi yang muncul pada mahasiswa angkatan ini tidak bisa dilepaskan dari “hubungan akrab” antara organisasi yang mempersatukan mahasiswa serta kiprah leluasa organisasi ekstra kampus, dipandang sebagai faktor yang dapat memberikan peluang bagi aksi-aksi tersebut.³

Tempat-tempat persemaian yang baik untuk pembentukan aktivis dan pemimpin gerakan protes mahasiswa adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas (BEM-F), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, dan Lembaga Per Kampus. Makassar sebagai salah satu kota yang dikenal mempunyai sejarah panjang terkait dengan pergerakan mahasiswa. Makassar sebagai sebuah kota metropolitan menjadi pusat atau pilihan utama masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan maupun di kawasan Indonesia Timur untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sehingga wajar jika semua orang yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan berlomba-lomba untuk mendaftar di perguruan tinggi yang ada di kota Makassar.

³ Sudiyo, Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 24.

Banyaknya kampus atau universitas yang tersebar di kota Makassar menjadikan masyarakat yang tinggal didalamnya memiliki akses yang luas dalam memperoleh pendidikan. Selain itu kampus atau universitas ini juga didukung oleh banyaknya organisasi mahasiswa yang berkembang didalamnya sehingga hal itu menjadi wadah bagi masyarakat atau mahasiswa dalam memperoleh pendidikan. Organisasi mahasiswa yang berada di naungan kampusnya masing masing juga tidak hanya berfokus kepada pengembangan pendidikan literasi atau pendidikan yang berfokus kepada keilmuan jurusannya saja. Tetapi organisasi mahasiswa juga aktif melakukan kegiatan pendidikan politik, yang awalnya hanya dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di lingkup fakultas ilmu social saja.

Fenomena pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan non FISIP menjadi sesuatu yang menarik karena pendidikan politik tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan oleh organisasi non FISIP, bahkan organisasi kemahasiswaan yang berada dalam focus keilmuan medis maupun agrokultura juga massif melakukan pendidikan politik kepada anggotanya sendiri maupun juga kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas membuat penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena organisasi kemahasiswaan non FISIP dalam melakukan pendidikan politik kepada

masyarakat. Dengan mengangkat judul **Pendidikan Politik Melalui Lembaga Kemahasiswaan (Studi Kasus; Strategi Pengembangan mahasiswa NON FISIP Di Kota Makassar).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa di kota Makassar terhadap pendidikan politik?
2. Bagaimana strategi pengembangan pendidikan politik yang dihadirkan organisasi kemahasiswaan non FISIP di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi dan pemahaman organisasi mahasiswa terkait pendidikan politik.
2. Mengetahui strategi pembaharuan pendidikan politik di organisasi kemahasiswa di kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

1. Lembaga mahasiswa mengetahui persepsi dan pemahaman tentang pendidikan politik di lembaga kemahasiswaan
2. Lembaga mahasiswa memiliki strategi pembaharuan dalam pendidikan politik di organisasi kemahasiswa.

B. Manfaat Praktis

Mampu menjadi sebuah gambaran bagaimana suatu organisasi mendirikan sekolah politik untuk mengembangkan pendidikan politik di lembaga kemahasiswaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan dalam Perspektif Paulo Freire

Pengamatan Freire terhadap praktek pendidikan manapun selalu mencakupi: 1) subjek atau pelaku (orang yang mengajar dan memberi tahu), 2) orang yang belajar, tetapi yang dengan belajar juga mengajar, 3) objek yang harus diajarkan dan diberitahukan, 4) metode-metode yang digunakan oleh orang yang mengajar untuk mendekati isi yang sedang diperantarainya/disampaikannya. Sesungguhnya isi dalam sifatnya sebagai objek yang dapat diketahui yang harus dikenali kembali pendidik selagi mengajarkannya kepada edukan, yang pada gilirannya memahami isi itu dengan menangkapnya, tidak dapat dipindahkan semata-mata dari pendidik kepada edukan, hanya semata-mata ditempatkan dalam edukan oleh pendidik.⁴

Praktek pendidikan selanjutnya melibatkan proses-proses, teknik-teknik, pengharapan-pengharapan, keinginan-keinginan, kekecewaan-kekecewaan, dan tegangan terus menerus antara praktek dan teori, antara kebebasan dan kewibawaan, jika penekanan pada salah satu dibesarkan, penekanan itu tidak dapat diterima dari sudut pandang demokrasi, hal yang juga tidak cocok dengan sikap otoriter dan sikap permisif. Dengan

⁴ Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nlai (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 106- 107

kata lain, bagi Freire, kegiatan pendidikan apapun yang berdasarkan pada standarisasi pada apa yang telah digariskan sebelumnya, pada rutinitas dimana segalanya telah ditentukan sebelumnya adalah bersifat membirokratisasikan dan dengan demikian anti demokrasi.

Pendidikan yang kritis menuntut konsisten dalam refleksinya tentang praktek pendidikan seperti dalam praktek sendiri selalu memahami pendirian dalam keseluruhannya. Ia tidak akan memusatkan praktek pendidikannya secara eksklusif pada misalnya edukan atau pendidik atau isi atau metode-metode, tetapi akan memahami praktek pendidikan berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara berbagai unsur pembentuknya dan akan melaksanakan praktek pendidikan itu secara konsisten dengan pemahamannya dalam segenap tindakannya menggunakan bahan-bahan, metode-metode dan teknik-teknik.

Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil, dan sekelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Kondisi ini merupakan kondisi yang tidak berimbang, tidak adil dan disebut sebagai situasi penindasan. Bagi Freire, penindasan adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan. Dehumanisasi ini bersifat ganda yaitu terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan diri minoritas kaum penindas. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi

mereka dinistakan, mereka dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam kebudayaan bisu. Sedangkan minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya.

Maka dari itu, ikhtiar memanusiaikan kembali manusia merupakan pilihan mutlak karena fitrah manusia yang sejati adalah pemanusiaan yang terletak pada tugasnya sebagai subjek yang sadar untuk merubah kenyataan yang menyimpang dari keharusan, yang dalam hal ini adalah humanisasi dan selain itu, karena dehumanisasi bukanlah takdir manusia melainkan produk tatanan yang tidak adil sehingga perjuangan menjadi mungkin untuk dilakukan.

Pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri yang bersifat objektif dan subjektif dalam arti kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektis yang konstan dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya.⁵ Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur dalam hubungan dialektisnya yang konstan yaitu pengajar dan pelajar sebagai subjek yang sadar dan realitas dunia sebagai objek yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektis semacam inilah yang terdapat dalam sistem pendidikan yang mapan.

⁵ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern, Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita* (Yogyakarta: IRCiSoD), h. 187.

Pendidikan Hadap Masalah sebagai Solusi bagi Pendidikan “Gaya Perbankan” Berangkat dari situasi masyarakat Brazil yang berada dalam masa transisi, maka pendidikan merupakan tugas mendesak dan yang diperlukan untuk masyarakat yang baru lahir ini ialah pendidikan kritis yang akan membantu terbentuknya sikap-sikap kritis, mengangkat kesadaran naif rakyat yang telah menenggelamkannya dalam proses sejarah dan membuatnya mudah termakan irasionalitas.

Politik Pendidikan Potensialnya terutama tergantung pada kemampuan rakyat untuk berperanan dalam gerak transisi itu yaitu melalui pemecahan yang cepat dan tepat untuk masalah-masalah yang rawan yang dilakukan bersama dengan rakyat dan bukan pemecahan untuk rakyat atau dengan memaksa rakyat.

Konsientisasi sebagai Tujuan Pendidikan Paulo Freire Dalam programnya di perkampungan kumuh Brazil, Freire memulai mengkonseptualisasikan sebuah proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan pada apa yang disebutnya sebagai kemanusiaan yang lebih utuh. Hasil dari proses ini dinamakannya conscientizacao, atau tingkat kesadaran dimana setiap individu mampu melihat sistem sosial secara kritis.⁶ Mereka dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat

⁶ Abdul Khadir, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), 60

mengeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama.

Freire mengkontraskan kesadaran kritis seseorang di dalam sebuah sistem dengan dua tingkat kesadaran lainnya yang lebih rendah. Kesadaran naif dicirikan dengan perilaku orang yang terlalu menyederhanakan dan meromantisasikan realitas, dia berusaha mereformasi individu-individu yang tidak adil dengan asumsi bahwa sistem yang mewadahnya bisa bekerja secara tepat.⁷ Kesadaran magis adalah fase dimana orang mengadaptasi atau menyesuaikan diri secara fatalistik dengan sistem yang ada. Dalam sistem pengkodean conscientizacao, terdapat 3 tahap dan masing-masing tahap terdiri dari tiga pertanyaan pokok yakni: masalah-masalah apa yang timbul dalam situasi ini? (Penamaan); mengapa masalah-masalah tersebut timbul? (Berpikir); dan apa yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi ini? (Aksi). Di setiap tahap, serangkaian kategori pengkodean didefinisikan dalam istilah-istilah perilaku khusus yang menggambarkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan di setiap tahap.

Conscientizacao memperhatikan perubahan-perubahan hubungan antar manusia yang akan memperbaiki penyelewengan manusia. bukanlah teknik untuk transfer informasi atau untuk pelatihan ketrampilan, tetapi

⁷ Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 49-50.

merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial mereka. Conscientizacao mengemban tugas pembebasan dan pembebasan itu berarti penciptaan norma, aturan, prosedur dan kebijakan baru. Pembebasan bermakna transformasi atas sebuah sistem realitas yang saling terkait dan kompleks, serta reformasi beberapa individu untuk mereduksi konsekuensi-konsekuensi negatif dari pelakunya.

Perbedaan-perbedaan pedagogis pokok antara conscientizacao dan bentuk-bentuk pendidikan lainnya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam conscientizacao tidak memiliki jawaban yang telah diketahui sebelumnya. Pendidikan bukanlah pengorganisasian fakta yang sudah diketahui sedemikian rupa sehingga orang bodoh melihatnya sebagai sesuatu yang baru. Pendidikan tidak sekedar mengajarkan fisika kepada siswa untuk menemukan kembali gaya gravitasi.⁸ Dan conscientizacao adalah sebuah pencarian jawaban-jawaban secara kooperatif atas masalah-masalah yang tak terpecahkan yang dihadapi oleh sekelompok orang. Dengan demikian, tidak ada 'ahli' yang mengetahui jawaban-jawaban tersebut dan yang pekerjaannya mentransfer jawaban-jawaban tadi. Setiap individu memiliki kebenaran yang sama, tetapi berbeda dalam cara melihat persoalan yang harus didefinisikan dan cara mencari jawabannya yang harus diformulasikan.

⁸Jalaluddin & Abdullah, Filsafat Pendidikan (Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 7-9

Partisipasi bukanlah sebuah alat pendidikan yang tepat, merupakan inti dari proses pendidikan. Conscientizacao bukanlah tujuan sederhana yang harus dicapai, tetapi merupakan tujuan puncak dari pendidikan untuk kaum tertindas.

2.2 Teori Logika Strategi

Strategi memberikan cetak biru yang koheren-untuk menjembatani kesenjangan antara realitas hari ini dan masa depan yang diinginkan. Ini adalah perhitungan disiplin dari tujuan, konsep, dan sumber daya yang menyeluruh dalam batas risiko yang dapat diterima untuk menciptakan hasil masa depan yang lebih menguntungkan daripada yang mungkin ada jika dibiarkan secara kebetulan atau tangan orang lain. Ini adalah pertimbangan hubungan bagaimana menerapkan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan strategis tertentu dari waktu ke waktu. Dalam konteks negara, strategi adalah penggunaan instrumen kekuasaan tertentu (politik/diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) untuk mencapai tujuan politik negara dalam kerja sama atau persaingan dengan aktor lain yang mengejar tujuan mereka sendiri mungkin bertentangan-tujuan. Dengan kata lain, ini adalah penerapan kekuatan yang melekat pada sumber daya alam dan masyarakat negara menuju tujuan kebijakan dalam lingkungan strategis yang muncul, dinamis, dan kompetitif.

Baik strategi maupun perencanaan berada di bawah sifat lingkungan. Strategi memiliki atribut yang berbeda dari perencanaan dalam ruang lingkup, asumsi, dan premisnya, tetapi strategi menyediakan struktur dan parameter untuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang lebih rinci.⁹ Baik strategi maupun perencanaan menggunakan tujuan, cara, dan sarana, dan dibatasi oleh kriteria kesesuaian, kelayakan, dan penerimaan. Strategi memiliki logika inheren tersendiri yang dapat dipahami dan diterapkan. Asumsi yang mendasari strategi dari perspektif nasional adalah bahwa semua negara-bangsa dan aktor non-negara memiliki kepentingan yang akan mereka kejar dengan kemampuan terbaik mereka. Kepentingan adalah keadaan akhir yang diinginkan yang dikategorikan dalam istilah seperti kelangsungan hidup, kesejahteraan ekonomi, tatanan dunia yang menguntungkan, dan nilai-nilai nasional atau kelompok yang bertahan lama. Kepentingan berasal dari kategori luas ini sebagaimana tercermin dalam lingkungan strategis dan dapat dinyatakan lebih spesifik dalam konteks isu.

Unsur-unsur kekuasaan adalah sumber daya yang digunakan untuk mempromosi memajukan kepentingan rasional atau kelompok. Sumber daya diterapkan melalui penggunaan instrumen kekuasaan.¹⁰ Peran strategi adalah untuk memastikan bahwa pengejaran, perlindungan, atau pemajuan

⁹ Harmen Batubara, *Strategi Sun Tzu Memenangkan Pilkada*, CV Garuda Mas Sejahtera, 2015, Hal 27.

¹⁰ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hal 26 et seq

kepentingan-kepentingan ini-yang dicapai melalui penerapan instrumen-instrumen kekuasaan untuk tujuan-tujuan tertentu guna menciptakan efek-efek strategis yang mendukung kepentingan berdasarkan pedoman kebijakan yang dicapai dalam secara koheren dan optimal.

Strategi pada dasarnya adalah tentang pilihan; itu mencerminkan preferensi untuk keadaan atau kondisi masa depan dan menentukan cara terbaik untuk sampai ke sana. Dalam melakukannya, strategi menghadapi musuh, sekutu, dan aktor lainnya; dan membahas masalah sumber daya dan organisasi; bahkan beberapa faktor akan tetap berada di luar kendali atau mungkin tidak terduga. Pilihan rasional, peluang dan probabilitas, aktor irasional, sekutu, dan pesaing adalah bagian dari paradigma strategis. Strategi secara inheren bersifat komprehensif; tujuan utamanya adalah untuk secara menguntungkan mempengaruhi lingkungan strategis yang kompleks dan mudah berubah dengan memberikan arahan untuk penerapan kekuasaan yang bijaksana menuju pencapaian tujuan yang didorong oleh kebijakan.

Proses strategis adalah semua tentang bagaimana (konsep atau cara) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan (sumber daya atau sarana) yang tersedia bagi negara untuk melakukan kontrol atas serangkaian keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (tujuan) sesuai dengan kebijakan negara.

Strategi memberikan arahan untuk penggunaan kekuatan ini secara paksaan atau persuasif untuk mencapai tujuan tertentu. Arah ini pada dasarnya proaktif, tetapi tidak prediktif. Strategi mengasumsikan bahwa sementara masa depan tidak dapat diprediksi, lingkungan strategis dapat dipelajari, dinilai, dan, pada berbagai tingkat, diantisipasi dan dimanipulasi. Hanya dengan analisis yang tepat tren, isu, peluang, dan ancaman dapat diidentifikasi, dipengaruhi, dan dibentuk melalui apa yang dipilih negara untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi strategi yang baik berusaha untuk mempengaruhi dan membentuk lingkungan masa depan sebagai lawan hanya bereaksi terhadapnya.

Strategi bukanlah manajemen krisis. Ini sebagian besar merupakan antitesisnya. Manajemen krisis terjadi ketika tidak ada strategi atau strategi gagal mengantisipasi dengan baik. Dengan demikian, premis pertama dari teori strategi adalah bahwa strategi bersifat proaktif dan antisipatif, tetapi tidak bersifat prediktif. Premis kedua adalah bahwa tujuan politik mendominasi semua strategi; ide ini mungkin paling baik dikemukakan dalam diktum terkenal Clausewitz, "Perang hanyalah kelanjutan kebijakan dengan cara lain. Tujuan politik dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan adalah ekspresi dari keadaan akhir yang diinginkan yang dicari oleh pemerintah. Dalam bentuk terbaiknya, kebijakan adalah artikulasi yang jelas dari panduan untuk penggunaan

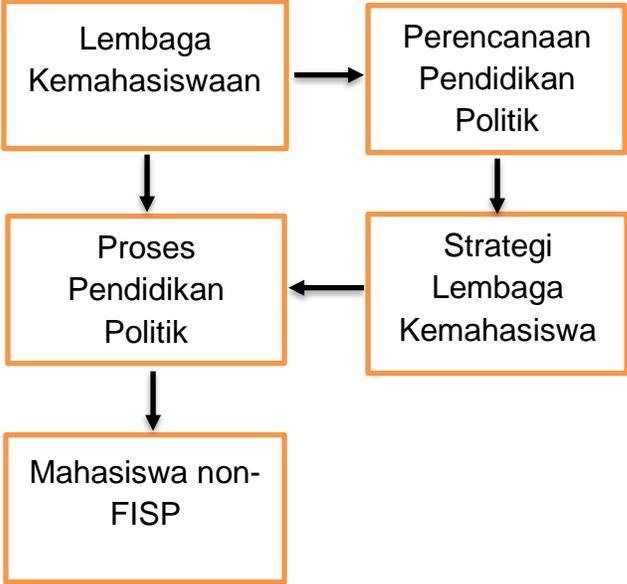
instrumen kekuasaan menuju pencapaian satu atau lebih tujuan atau keadaan akhir.

Premis ketiga, adalah bahwa strategi berada di bawah siff lingkungan strategis. Strategi dikembangkan dari pertimbangan yang cermat terhadap situasi strategis dan pengetahuan tentang siff lingkungan strategis. Lingkungan strategis memiliki atribut fisik dan metafisik. Ini memiliki komponen domestik dan eksternal. Lingkungan internasional adalah komponen eksternal, yang terdiri dari lingkungan geografis fisik, sistem internasional, dan aktor eksternal lainnya-dan budaya, kepercayaan, dan mereka. Premis keempat, adalah bahwa strategi bersifat holistik dalam pandangan. Ini menuntut pertimbangan yang komprehensif. Artinya, sementara ahli strategi mungkin merancang strategi dari perspektif tertentu, ia harus mempertimbangkan seluruh lingkungan strategis dalam analisisnya untuk sampai pada strategi yang tepat untuk melayani tujuan yang dimaksudkan di tingkatnya. Dia memperhatikan faktor eksternal dan internal di semua tingkatan dan integrasi horizontal dan vertikal dari strateginya.

Singkatnya, strategi memiliki logika yang melekat yang dapat dipahami dan diterapkan. Ini berbeda dari perencanaan dan melayani tujuan yang unik.ini berbeda dari perencanaan dalam atribut, ruang lingkup, asumsi, dan premis, tetapi memberikan struktur dan parameter keseluruhan untuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang lebih rinci. Baik strategi

maupun perencanaan menggunakan tujuan, cara, dan sarana, dan dibatasi oleh kriteria kesesuaian, kelayakan, dan penerimaan. Strategi yang baik didasarkan pada pemahaman dan analisis yang tepat tentang lingkungan strategis dan kepentingan dan kebijakan nasional, serta pemahaman tentang teori dan peran strategi. Ali strategi menerima bahwa masa depan tidak dapat diprediksi, tetapi percaya bahwa masa depan dapat diantisipasi dan dibentuk dengan cara yang menguntungkan melalui penciptaan efek strategis yang bijaksana. Teori strategi memandu dan mendisiplinkan pengembangan dan pelaksanaan strategi yang baik.

2.3 Skema Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, maka jenis penelitian yang dapat digunakan adalah deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisis objek penelitian dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, terperinci, akurat dan tuntas. Penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami, dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala/kejadian. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tertentu.¹¹ “Jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif”.¹²

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Kota Makassar dengan mengambil mahasiswa yang memiliki jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di beberapa kampus yang ada di kota Makassar. Pengambilan informan pada penelitian ini

¹¹ Suyitno, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. Hal. 6.

¹² Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 10.

bermaksud menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa non-fisip terhadap pendidikan politik dan mengetahui strategi yang dilakukan lembaga kemahasiswaan untuk meningkatkan pemahaman pendidikan politik mahasiswa non-fisip.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (sumber pertama).¹⁴ Kata-kata, persepsi, dan hasil pemikiran merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis melakukan wawancara (komunikasi langsung) secara mendalam dengan para informan

¹³ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 157.

¹⁴ Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. Hal. 1.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil penelitian (survey) yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi dan memperkuat kedalaman penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap yang menentukan proses ketercapaian suatu hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu; wawancara mendalam dan arsip / dokumen.

3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi atau teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai¹⁵. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus dari penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum hingga pertanyaan yang bersifat khusus. Metode tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh dan menghasilkan data yang lengkap sehubungan dengan penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Reka Hafidz	Anggota Bem Kedokteran Unhas
2.	Fuad Sasmito	Anggota Bem Teknik Unhas
3.	Reski	Wakil Ketua Bem FKM Unhas
4.	Adrian	Ketua Bem Fakultas Pertanian UIN
5.	Salsabilah Aisyah	Anggota Bem Fakultas Hukum UIN
6.	Rachmat Ariwinata	Anggota BEM Fakultas Teknik UIM
7.	Andi Fauzan	Anggota Bem Fakultas Ekonomi Upri
8.	Mutiah	Anggota Bem FK Unismuh

¹⁵ Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 105

3.4.2 Arsip dan Dokumen

Dokumen merupakan metode penumpukan data sekunder dengan mencatat data-data yang telah ada terlebih dahulu. Dalam penelitian ini metode dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah¹⁶. Sedangkan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis, yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut, dengan penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh seperti hasil wawancara dan telaah pustaka, kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen dan kesimpulan yang tepat.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian deskriptif dilakukan

¹⁶ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hal. 329

untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Kemudian data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian mengenai “Pendidikan Politik Melalui Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus: Strategi Pengembangan Mahasiswa Non Fisip di Kota Makassar)”. Penelitian ini berlangsung di kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tempat keberadaan mahasiswa non FISIP sebagai objek utama dalam penelitian ini.

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum kota makassar sebagai lokasi penelitian dan persebaran persebaran perguruan tinggi di kota Makassar. Yang kemudian akan di analisis dalam penelitian ini.

4.1 Kota Makassar

4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara Geografis Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77km² yang meliputi 14 Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Makassar, Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km² atau 27,43% dari luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah Kecamatan yang mempunyai luasan terkecil adalah Kecamatan Mariso yaitu 1,82 Km² atau 1,04 dari total wilayah Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.1 . Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,431
6	Ujung Pandang	2,63	1,50

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakuk kang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
Jumlah		175,77	100,00

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah mencapai 48,22 Km² sedangkan Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 Km². Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik yaitu 1.469.601 Jiwa yang terdiri atas 727.314 penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 742.287 penduduk berjenis kelamin perempuan, perkembangan penduduk di Kota Makassar sendiri mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 dengan jumlah penduduk 1.369.606 jiwa hingga pada tahun 2016 menjadi 1.469.601 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Mariso	59.292
2.	Mamajang	61.007
3.	Tamalate	194.493
4.	Rappocini	164.493
5.	Makassar	84.758
6.	Ujung Pandang	28.497
7.	Wajo	30.933
8.	Bontoala	56.536
9.	Ujung Tanah	49.223
10.	Tallo	139.167
11.	Panakuk kang	147.783
12.	Manggala	138.659
13.	Biringkanaya	202.520
14.	Tamalanrea	112.170
Total		1.469.601

Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2022

Pada tabel diatas diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota Makassar mengalami pertambahan setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi tahun terakhir terdapat di Kecamatan Biringkanaya dengan 202.520 jiwa. Perkembangan penduduk di Kota Makassar terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dan dalam persebarannya, penduduk

Kota Makassar tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan Makassar memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan 3,523 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 112.170 jiwa.

4.1.2 Sejarah Kota Makassar

Kota Makassar yang pernah bernama Ujungpandang adalah wilayah kerajaan Gowa dan Tallo yang terletak di pesisir pantai sebelah barat semenanjung Sulawesi Selatan. Pada mulanya merupakan bandar kecil yang didiami oleh Suku Makassar dan Bugis yang dikenal sebagai pelaut ulung dengan perahu Pinisi atau Palari. Jika ditinjau dari sejarah Kerajaan Majapahit dibawah Raja Hayam Wuruk (1350-1389) dengan Maha Patih Gajah Mada bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Gowa ke-II Tumasalanga Baraya (1345-1370), Makassar sudah dikenal dan tercantum dalam lembaran Syair 14 dan Kitab Negarakertagama karangan Prapanca (1364) sebagai Daerah ke-VI Kerajaan Majapahit di Sulawesi. Adapun masa sejak pertama kalinya berdiri kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo

1. Kerajaan Gowa berdiri kira-kira tahun 1300 Masehi dengan raja yang pertama adalah seorang perempuan bernama Tumanurung (1320-1345) yang kawin dengan Karaeng Bayo berasal dari Bonthain yang menurunkan rajaraja Gowa selanjutnya.

2. Pusat Kerajaan Gowa ini terletak diatas bukit Takka'bassia yang kemudian berubah namanya menjadi Tamalate, tempat ini menjadi pusat Kerajaan Gowa sampai kepada masa pemerintahan Raja Gowa ke-VIII I-Pakere Tau Tunijallo Ri Passuki (1460-1510).
3. Dalam masa pemerintahan Raja Gowa ke-VI Tunatangka Lopi (1445-1460) terjadi pembagian kerajaan, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, masing-masing dipegang oleh kedua puteranya yaitu Kerajaan Gowa dipegang oleh Batara Gowa Tuniwanga Ri Paralekanna sebagai Raja Gowa ke-VII (1460) dan Kerajaan Tallo dipegang oleh Karaeng Loe Ri Sero sebagai Raja Tallo Pertama.
4. Raja Gowa ke-IX Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi yang bergelar Tumapa'risi Kallona kedua kerajaan Gowa dan Tallo disatukan kembali dan diperintah oleh Raja Gowa, dan yang menjadi Mangkubumi adalah Raja Tallo. Kedua kerajaan ini sering disebut Kerajaan Makassar.
5. Pembangunan Benteng Somba Opu dari tanah liat pada tahun 1525 oleh Raja Gowa ke-IX Tumapa'risi Kallonna (1510-1546). Dalam benteng ini dibangun istana raja Gowa. Makassar (Kerajaan Gowa) menjadi pusat bandar niaga dengan syahbandar adalah Daeng Pammate yang diangkat pada tahun 1538. Sejak itu Makassar menjadi Ibu Negeri, dengan bertitik pusat pada Kota Raja Somba Opu.

6. Raja Gowa ke-X I-Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) Benteng Somba Opu disempurnakan dan dibangun dari batu bata.
7. Benteng Jum pandang (Ujung Pandang) yang mulai didirikan pada tahun 1545 pada masa pemerintahan Tumapa'risi Kallonna kemudian dilanjutkan oleh Tunipallangga Ulaweng, maka oleh Raja Gowa Sultan Alauddin pada tanggal 9 Agustus 1634 membuat dinding tembok Benteng Ujung Pandang, dan pada tanggal 23 Juni 1635 dibuat lagi dinding tembok kedua dekat pintu gerbang sehingga menyerupai seekor penyu.
8. Raja Gowa ke-XIV I-Mangngarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin memerintah mulai tahun 1593-1639 dengan Mangkubumi I-Mal-Ling

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke 55 arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang

bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan.

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir

400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota.

Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan "Jumpandang" yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 175.77 km.

4.2 Perguruan Tinggi di kota Makassar.

Jika kita mengikuti jalan pikiran Alvin Toffler bahwa semua proses pendidikan merupakan semua kegiatan yang lahir dari suatu pandangan ke depan, bahkan membentuk gambaran masa depan, maka perguruan tinggi yang merupakan salah satu mata rantai kegiatan atau lembaga pendidikan sudah seyogyanya menerapkan peranan penting dalam tugas pendidikan. Didalam memandang kearah masadepan, kita akan merumuskan pandangan tentang kebudayaan dan peradaban". Menurut Alija Izetbegovic (1984), peradaban memberi pendidikan, sedang kebudayaan memberi pencerahan. Yang satu memerlukan belajar, yang satu lagi memerlukan meditasi (perenungan). Dengan demikian pendidikan (terutama pada perguruan tinggi),

merupakan tanggung jawab dua dimensional, mencakup pembelajaran religius, moral dan artistik serta kebenaran-kebenaran obyektif dan ilmiah.

Dengan posisinya yang sangat menguntungkan dalam kebudayaan dan peradaban ini, pendidikan tinggi dituntut untuk' secara simultan melakukan pembaharuan metode, teori dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan untuk masyarakat mendatang. Dalam peranannya terhadap perkembangan kebudayaan dan peradapan dunia, maka perguruan tinggi memiliki pengertian sebagai suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang secara simultan melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dan melakukan pengabdian terhadap kepentingan manusia. Selanjutnya pengertian perguruan tinggi secara adalah satuan lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam rangka menanggapi tujuan nasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan sosial. Dengan demikian perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Terlebih penting lagi bahwa perguruan tinggi merupakan pusat pemikiran bagi pengembangan pola pembangunan yang dirumuskan.

Tabel 4.3 Jumlah Perguruan Tinggi di Kota Makassar

Kecamatan	Negeri	Swasta
Mariso	-	4
Mamajang	-	5
Tamalate	-	11
Rappocini	1	6
Makassar	-	8
Ujung Pandang	-	6
Wajo	-	1
Bontoala	-	2
Ujung Tanah	-	-
Kepulauan Sangkarrang	-	-
Tallo	-	-
Panakkukang	-	15
Manggala	-	9
Biringkanaya	-	3
Tamalanrea	3	19
TOTAL	4	89

Diolah dari Badan Pusat Statistik "Makassar dalam Angka tahun 2023"

Perguruan tinggi negeri di kota Makassar ada empat yakni, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN), Politeknik Negeri Ujungpandang (Poltek). Sedang Perguruan tinggi swasta ada enam belas, yakni Universitas Muslim Indonesia Universitas Atma Jaya Makassar Universitas Fajar (Unifa) Universitas Muhammadiyah Makasar Universitas Kristen Indonesia Paulus Universitas Pepabri Makassar Universitas Bosowa Makassar Universitas Sawerigading Makassar Universitas Satria Makassar Universitas Pancasakti Universitas Cokroaminoto Universitas Veteran Ri Universitas Islam Al-Gazali (Univ. Islam Makassar) Universitas Teknologi Sulawesi (Uts) Universitas Patria Artha Universitas Indonesia Timur. Selain itu ada dua instiute dan 45 sekolah tinggi

yang berada di kota Makassar yakni, Institut Di Makassar Institut Sains Teknologi Pemb. Indonesia Institut Kesenian Makassar (Ikm). Sekolah Tinggi Di Makassar Stmik Dipanegara Makassar Stisipol 17-8-1945 Makassar Stkip Yppup Makassar St. Filsafat Jaffrau Makassar Stie Indonesia Makassar Stie Ypup Makassar Stia Yappi Makassar Stitek Dharma Yadi Makassar Stiem Bongaya Ypbup Makassar Stkip Pembangunan Indonesia Stie Pembangunan Indonesia Stie Bajiminasa Makassar Stiks Tamalanrea Makassar Stim Lpi Makassar Stimi Yapmi Makassar Stie Lpi Makassar Stie Nusantara Makassar Stie Amkop Makassar Stim Nitro Makassar Stik Tamalatea Makassar Stmik Handayani Makassar

St. Teologia Intim Makassar Stie Rezky Stik Makassar Stie Makassar Maju Stie Tri Dharma Nusantara Stie Nobel Makassar Stim Publik Makassar Stmik Kharisma Stie Wira Bhakti Stitek Dirgantara Stimlash Makassar Stikes Graha Edukasi Stikes Stella Maris Stikes Rsu Daya Stimik Akba Stie Pelita Buana Stikes Amanah Stimik Profesional Stikes Bataraguru Soroaka Stitek Kelautan Balik Diwa Stikes Gema Insani Akademika Stimed Nusa Palapa Sti Parawisata Tamaanrea Sti Farmasi Akademi Di Makassar Inilah Daftar Kampus Dengan Nama Akademi Di Makassar. Bukan Hanya Perawat Atau Bidan Yah, Lihat 42 Daftar Berikut. Akademi Bahasa Asing Umi Akademi Maritim Ind. Veteran Makassar Akademi Sekretari Manajemen Atmajaya Makassar Akademi Manaj. Infor. Kom. Rezki Makassar Akademi Perawatan

Muhammadiyah Makassar Akademi Manajemen Inf. Kom. Makassar Akademi
Sek. Manaj. Ind Lpi Makassar Akademi Manaj. Inf. Kom. Prof Makassar
Akademi Sek. Manaj. Inf. Yapika Makassar Akademi Hiperkes Makassar
Akademi Analis Kimia Yapika Makassar Akademi Pertambangan Makassar
Akademi Keperawatan Nusantara Jaya Makassar

Akademi Teknik Otomotif Akper Reformasi Akbid Sandi Karsa Akper
Sandi Karsa Akper Yapi Akper Makassar Akbid Muhammadiyah Akper Al-
Hambra Akbid Yapma Akbid Minasa Upa Akademi Madani Sinjai Akademi
Teknik Elektromedik Muhammadiyah Akademi Farmasi Kebangsaan Akademi
Radiodiagnostik & Radioterapi Muhammadiyah Akbid Nusantara Jaya
Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Akademi Farmasi Sandi Karsa
Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Akbid Inau Akbid Pelamonia
Kesdam Vii/Wirabuana Akbid Haji Amirullah Akbid Reformasi Akper Rumah
Sakit Tk. Ii Pelamonia Akademi Maritim/Aipi Indonesia Akademi Manajemen
Perusahaan Makassar Akademi Bahasa Asing Atmajaya Makassar Akademi
Ilmu Gizi Ypag Makassar Akademi Pariwisata Ypag Makassar Akademi
Sekretari Manajemen Indonesia Publik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada beberapa informan di lokasi penelitian yakni di kota Makassar, terdiri dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi di kota Makassar dengan berbagai jurusan diluar dari lingkup FISIP. Dalam penelitian ini membahas menyangkut Pendidikan Politik Melalui Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus: Strategi Pengembangan Mahasiswa Non Fisip Di Kota Makassar) yang dapat di jelaskan dengan 2 (dua) aspek *pertama*, pemahaman mahasiswa non-FISIP menyangkut pendidikan politik. *Kedua*, bentuk pengembangan pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi non-FISIP di kota Makassar. Dimana kedua aspek ini dijelaskan lebih lanjut pada bab ini.

5.1 Pemahaman Mahasiswa non-FISIP tentang Pendidikan Politik.

Kesejahteraan warga negara sebuah negara tertentu bisa tercipta yaitu salah satunya dengan upaya perbaikan kualitas Pendidikan yang ada di negara tersebut. Ada berbagai jenis Pendidikan yang dimaksud kalimat pertama, dan salah satu dari jenis Pendidikan yang harus diberikan kepada warga negara adalah Pendidikan politik. Pendidikan politi adalah sebagai upaya menumbuhkembangkan kepribadian politik yang searah dengan budaya politik masyarakat yang berada di institusi-institusi tersebut pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kesadaran politik perlu ditumbuh

kembangkan dengan meningkatkan partisipasi warga negara yang aktif dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat umum dengan berbagai macam cara sumbangsih yang memungkinkan dan memberikan perubahan kearah yang lebih mapan dan baik.

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai political socialization. Menurut Supriyadi kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian.¹⁷ Alfian menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya Alfian menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.¹⁸

Menurut Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.¹⁹ Sementara Rusadi Kantaprawira memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik

¹⁷ Supriyadi, Dedi. 1999. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. Hal. 70

¹⁸ Alfian. 1981, pemikiran dan perubahan politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Hal.235

¹⁹ Kartono. Kartini, 1996, Pemimpin dan Kepimpinan. CV. Rajawali. Hal. 64

rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²⁰ Kosasih Djahiri menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa, negara dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada.²¹ Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Merujuk dari beberapa pernyataan diatas, pemahaman akan pendidikan politik dari kalangan mahasiswa non-FISIP dalam penelitian ini relatif sempit dan menyurus hanya pada satu pemahaman. Seperti yang disampaikan narasumber pertama, Reka Hafidz selaku anggota BEM Fakultas Kedokteran Unhas yang dalam pemahamannya menjelaskan:

“Pendidikan politik menurut pendapat pribadi saya menyangkut pemahaman kita tentang berdemokrasi. Bagaimana kita sebagai

²⁰ Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Bandung. Hal. 54

²¹ A.Kosasih, Djahiri. (1995). Dasar Umum Metodologi Pengajaran Pendidikan. Nilai Moral. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP-IKIP Bandung. Hal. 18

mahasiswa menerapkan dan memahami esensi dari demokrasi itu. Sebab mahasiswa adalah representasi dari demokrasi itu sendiri.”²²

Pernyataan narasumber diatas juga tidak jauh berbeda dengan pemahaman narasumber kedua yang peneliti wawancara. Narasumber pertama menjelaskan pendidikan politik lebih kepada pemahaman dan kesadaran pada demokrasi. Sedangkan narasumber kedua Fuad Sasmito selaku Anggota BEM Fakultas Teknik Unhas menjelaskan pendidikan politik menyakut bagaimana pemahaman akan pentingnya terlibat dalam pemilihan umum. Dalam wawancaranya narasumber lebih lanjut menjelaskan :

“Pendidikan politik menurut saya banyak berbicara tentang bagaimana kita aktif dalam proses menentukan pemimpin kita. Bagaimana pentingnya peran kita dalam proses demokrasi. Bagaimana kita memposisikan diri dalam menjaga esensi demokrasi. Jadi dalam hal ini pendidikan politik itu banyak berbicara tentang proses-proses memilih pemimpin.”²³

Selain narasumber pertama dan kedua. Peneliti juga mengambil pandangan tentang pendidikan politik dari narasumber yang lain yakni Salsabila Aisyah selaku Anggota BEM FH UIN Alauddin. Dalam wawancara, narasumber ketiga menjelaskan pemahamannya tentang pendidikan politik yang berbeda dengan penjelasan dari narasumber pertama dan kedua. Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan, menjelaskan :

²² Wawancara dengan Reka Hafidz anggota BEM FK Unhas. Tanggal 17 Juni 2023

²³ Wawancara dengan Fuad Sasmito anggota BEM Teknik Unhas. Tanggal 14 Juni 2023

“Pendidikan politik menurut saya memiliki pemaknaan yang luas. Berangkat dari kata politik kita bisa mendefinisikan bahwa pendidikan politik itu berkaitan dengan proses ketatanegaraan. Maksud saya, pendidikan politik itu berbicara banyak menyangkut kesadaran kita memahami dinamika dan proses dalam bernegara, baik itu pengambilan kebijakan sampai dengan penyampaian pendapat yang merupakan hak kita sebagai warga negara.”²⁴

Dari beberapa pernyataan narasumber diatas, kita dapat melihat bahwa sebagian besar mahasiswa non-FISIP menganggap bahwa pendidikan politik itu berkaitan dengan politik dalam konteks praktis yang tidak jauh dari politik elektoral dan kata demokrasi. Namun jika memandangkan dari beberapa pernyataan-pernyataan para ahli. Pendidikan politik memiliki makna yang lebih luas. Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik sebagai upaya formal maupun nonformal yang dicurahkan untuk membantu pada generasi dan pemuda agar bisa berpikir merdeka tentang hukum dan kekuasaan, memberikan penyadaran kepada mereka tentang persoalan-persoalan kontemporer regional, nasional maupun internasional dengan tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan organisasi yang menjamin peningkatan partisipasi

²⁴ Wawancara dengan Salsabila Aisyah anggota BEM FH UIN Alauddin. Tanggal 18 Juni 2023

politik individu, bingkai falsafah masyarakat, tujuan-tujuan dan kemaslahatannya.

Pendidikan dan pengetahuan umum tentang perpolitikan tidak selalu berasal dan diperoleh dari Pendidikan formal semata dengan asumsi dengan mengikuti Pendidikan atau mata kuliah yang berkaitan dengan politik, misalnya Pendidikan kewarganegaraan atau mata kuliah yang berkaitan dengan Pendidikan politik. Pendidikan mengenai pancasila dan mata kuliah spesifik pada jurusan tertentu pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran dan pengetahuan umum berkaitan dengan politik bisa didapatkan melalui aktifitas serta keterlibatan mahasiswa dalam berorganisasi kemahasiswaan. Berbagai macam kampus sudah menyediakan fasilitas seperti ini. Dari keorganisasian secara kampus, fakultas maupun jurusan. Bahkan beberapa kampus besar yang mahasiswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mereka memiliki organisasi mahasiswa yang berasal dari satu daerah.

Mahasiswa hari ini memiliki banyak alternatif dalam mendapatkan dan melaksanakan pendidikan politik. Salah satunya dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Namun tidak semua lembaga/organisasi kemahasiswaan paham akan pendidikan politik. Di mata masyarakat umum, pendidikan politik hanya akrab pada mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan Sosial Humaniora dibanding mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan keteknikan, ilmu pengetahuan alam dan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri

pemahaman masing-masing lembaga/organisasi kemahasiswaan menyangkut pendidikan politik itu berbeda. Sebab pendidikan politik pada hakekatnya memiliki penafsiran yang luas. Setiap pemikir memiliki landasannya sendiri dalam mendefinisikan pendidikan politik itu sendiri. Beberapa hanya menganggap pendidikan politik tentang penyadaran tentang mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Beberapa juga menganggap pendidikan politik itu penyadaran akan bagaimana bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya.

Miriam Budiardjo menuturkan bahwa kegiatan keorganisasian para mahasiswa memiliki berbagai jenis kegiatan: mempraktekkan berdiskusi berbagai topik yang hangat, belajar berorasi, melakukan dan menghadiri seminar / talkshow, training, melakukan aksi lapangan dan berdemonstrasi, melakukan pembelaan hak mahasiswa, melakukan pemilihan mahasiswa, sidang umum mahasiswa, berbakti sosial, dan lainnya.”²⁵ Kegiatan yang disebutkan menggambarkan proses belajar Pendidikan politik para peserta kegiatan yang notabene adalah mahasiswa yang pada akhirnya dari proses belajar mereka tersebut mereka diharapkan bisa memiliki sudut pandang yang luas tentang politik yang baik.

²⁵ Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka Utama. Hal. 19

Hermawan mengaitkan pengetahuan tentang politik dalam aktifitas keorganisasian mahasiswa, dengan Pemahaman para mahasiswa tentang rumus dan formula pembelajaran politik yang terkumpul melewati proses sosial yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan sosial yang beraneka warna. Proses pembelajaran politik (sosialisasi politik) mulai ditanamkan pada situasi terkecil yaitu keluarga, di sekolah, sumber informasi yaitu media massa, dan keaktifan pada organisasi mahasiswa (Ormawa). Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi institut perguruan tinggi itu sendiri yang bekerja secara organisatoris.

Walaupun konteks dari pendidikan politik memiliki penafsiran yang luas tetap saja organisasi kemahasiswaan harus tetap menjalankan pendidikan politik. Mahasiswa sering diidentikkan dengan “agent of change”. Kata-kata perubahan selalu menempel dengan erat sekali sebagai identitas para mahasiswa yang juga dikenal sebagai kaum intelektualitas muda. Dari mahasiswa lah ditumpukan besarnya harapan, harapan untuk perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tugasnyalah melaksanakan dan merealisasikan perubahan positif, sehingga kemajuan di dalam sebuah negeri bisa tercapai dengan membanggakan. Mahasiswa sebagai pembaharu

sangat perlu memiliki kesadaran politik dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Karena harus diakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah lepas dari politik.

Keterlibatan mahasiswa dalam melakukan perubahan bukanlah merupakan gerakan yang diperankan secara individu, melainkan peran mahasiswa hadir secara berkelompok atau kolektif. Perjuangan mahasiswa juga tidaklah lepas dari peran dan fungsi organisasi mahasiswa. Lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan adalah wadah pelaksanaan kegiatan mahasiswa di kampus. Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi kemahasiswaan hadir di tengah mahasiswa sebagai wadah untuk pengembangan diri termasuk dalam hal politik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rachmat Ariwinata, selaku anggota BEM Fakultas Teknik UIM Makassar yang dalam wawancara menyampaikan :

“Mahasiswa memiliki sejarah panjang bangsa Indonesia. Baik itu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Hal ini yang membuat mahasiswa sangat identik dengan semangat perjuangan. Jika kita lihat sejarah mahasiswa-mahasiswa bergerak sangat sarat dengan yang namanya politik. Karena lembaga perguruan tinggi berbeda dengan tingkat pendidikan yang lain di Indonesia. Perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa memiliki berperan ganda selain melakukan tugasnya menimbah ilmu pendidikan secara formal juga memainkan peran dalam penyeimbang

jalannya negara. Hal ini yang menurut saya mahasiswa harus memahami dan mau tidak mau tahu politik.”²⁶

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan tersebut. Narasumber memahami pentingnya mahasiswa memahami dan mendapatkan pendidikan politik. Mengingat pentingnya pendidikan politik itu sehingga dalam melakukan kegiatan dan perannya mahasiswa merasa perlu mengetahui arti politik secara utuh. Dalam pernyataan lain yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Seperti yang dijelaskan oleh Reka Hafidz selaku Anggota BEM Fakultas Kedokteran Unhas menyampaikan bahwa banyak saluran yang bisa dijadikan mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan politik. Salah satunya dengan berkegiatan didalam organisasi kemahasiswaan yang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan politik.

Dalam wawancara lebih lanjut dia menjelaskan bahwa :

“Lembaga kemahasiswaan memiliki peran dalam proses pendidikan politik bagi mahasiswa. Lembaga kemahasiswaan berusaha memahami anggotanya untuk melek terhadap politik. Karena tidak dipungkiri lembaga kemahasiswaan lahir dari pemahaman kita terhadap politik itu sendiri. Yakni pemahaman kita untuk mencapai satu tujuan yang dalam hal ini berserikat dan berkumpul.”²⁷

²⁶ Wawancara dengan Rachmat Arwinata anggota BEM Fakultas Teknik UIM. Tanggal 10 Juni 2023

²⁷ Wawancara dengan Reka Hafidz anggota BEM FK Unhas. Tanggal 17 Juni 2023

Pernyataan yang sama juga di jelaskan oleh Salsabilah Aisyah selaku Anggota BEM Fakultas Hukum UIN Alauddin dalam wawancaranya menjelaskan :

“Kita bisa mendapatkan pendidikan politik caranya terdekatnya dari lembaga kemahasiswaan. Dan pada dasarnya itu adalah tugas lembaga kemahasiswaan untuk memberikan pendidikan politik. Sebab kembali lagi yang saya jelaskan tadi bahwa mahasiswa itu identik dengan politik. Politik yang dalam konteks ini luas. Mengingat peran mahasiswa yang selalu berada pada sisi masyarakat dan menjadi penyeimbang jalannya negara maka untuk melaksanakan tugas itu mahasiswa harus di berikan pendidikan sedini mungkin. Dan lembaga kemahasiswaan berperan untuk itu.”²⁸

Organisasi Mahasiswa (ormas) merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu dalam proses pembentukan sikap demokratis. Ormas merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri, pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ormas juga dapat membantu dalam proses pembentukan sikap demokratis dengan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengembangan karakter. Pembentukan sikap demokratis merupakan proses yang penting dalam menyiapkan generasi muda yang memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, serta mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran ormas dalam membentuk sikap demokratis sangat

²⁸ Wawancara dengan Salsabila Aisyah anggota BEM FH UIN Alauddin. Tanggal 18 Juni 2023

penting untuk dikaji dan diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ormas dalam membentuk sikap demokratis mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Posisi organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus-kampus adalah sebagai kesempurnaan di luar struktural pada organisasi yang ada di kampus-kampus yang bekerja sesuai sistem dan peraturan yang telah diputuskan oleh kampus. Manfaat keorganisasian kemahasiswaan merupakan sebagai wadah dan wahana. Keterwakilan mahasiswa yang dapat menampung dan menyalurkan ide-ide mahasiswa, memutuskan garis besar program, dan melakukan berbagai aktifitas yang telah diputuskan. Komunikasi ide-ide antar mahasiswa. Mengembangkan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademik yang lengkap dan utuh. Mengembangkan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan jiwa kepemimpinan. Membina dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang bisa berpeluang menjadi kader-kader bangsa dimasa depan. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma akademik, etika, moral, agama, dan berpengetahuan secara kebangsaan.

Beban keorganisasian kemahasiswaan pada derajat kebebasan dan mekanisme kerja pada semua aktifitas atau acara yang telah diputuskan haruslah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai akademik. Menjaga amanah dengan sungguh-sungguh. Menjaga dan melangsungkan

keberlangsungan organisasi yang diembannya. Menjaga citra kampusnya sebagai kampus yang unggul. Organisasi mahasiswa merupakan central dan wadah yang sangat tepat dalam pembentukan karakter, sikap sehari-hari para mahasiswa. Pertumbuhan dan kepandaian berkomunikasi dengan sesama, emosi para mahasiswa, tumbuh dan terasah melalui realitas keorganisasian. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut jelas sekali bahwa keorganisasian mahasiswa merupakan wadah untuk pembelajaran politik yang sangat ideal. Dengan mengikuti kegiatan keorganisasian mahasiswa, kemungkinan besar dapat memberikan dampak positif terhadap pembelajaran politik secara praktis, entah itu melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun melalui memperhatikan gejolak politik yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

5.2 Bentuk Pengembangan Pendidikan Politik Organisasi Kemahasiswaan non-FISIP di kota Makassar.

Bentuk pendidikan politik menurut Dannis Kavang, itu terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. (b) Bentuk dan

proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politik tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).²⁹

Organisasi kemahasiswaan khususnya mahasiswa non-FISIP memiliki cara dan mekanisme tersendiri dalam melakukan pendidikan politik di internal organisasinya. Dalam penelitian ini menunjukkan ada dua garis besar dari bentuk pengembangan pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan non-FISIP diantaranya :

5.2.1 Menyisipkan Pendidikan Politik dalam Proses Kaderisasi.

Organisasi kemahasiswaan terdiri atas beberapa unsur-unsur penting di antaranya yang paling penting yaitu anggota organisasi atau kader. Tanpa adanya kader tersebut organisasi akan mengalami kekosongan dan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Roda penggerak organisasi tersebut terletak pada kader tersebut. Hal tersebut seperti diungkapkan Winardi yang mendefinisikan organisasi sebagai sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, di antara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.³⁰

²⁹ Dannis Kavang. *Political Culture*. Armico. Bandung. 1998. Hal 45

³⁰ Winardi. 2011. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 15

Langkah pengaderan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan merupakan langkah untuk memberdayakan mahasiswa sebagai sumber daya organisasi.

Pengaderan ini dilakukan bukan hanya sebatas untuk memperbanyak kader, namun juga dilakukan sebagai sarana pelatihan agar kader memiliki pemahaman tentang organisasi yang diikuti dan memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi tersebut. Kaderisasi yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dalam kaderisasi formal maupun nonformal. Proses kaderisasi bertumpuh pada materi-materi yang diberikan selama berlangsungnya kaderisasi tersebut. Adapun materi-materi tersebut diantaranya tentang manajemen organisasi, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan, dan hal lain yang sesuai kebutuhan organisasi yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

Kaderisasi formal dalam lembaga kemahasiswaan mempunyai cara dan nama yang berbeda-beda tiap organisasi kemahasiswaan di masing-masing universitas. Biasanya kaderisasi formal ini merupakan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan langsung sebagai sebuah kewajiban dalam organisasi. Sedangkan pengaderan nonformal meliputi kajian-kajian dan diskusi yang sifatnya lebih fleksibel. Mahasiswa baru ingin menjadi anggota suatu organisasi biasanya mengikuti tahapan pengaderan. Dalam pelaksanaan di tiap-tiap organisasi berbeda, biasanya dilaksanakan selama dengan memberikan materi-materi dasar tentang kemahasiswaan. Dalam tahapan

kaderisasi ini-lah yang dilakukan pengurus organisasi untuk menjalankan proses pendidikan politik. Seperti yang ditekankan oleh Rachmat Ariwinata selaku Anggota BEM Fakultas Teknik UIM, menjelaskan dalam wawancara :

“Cara kami memasukkan pendidikan politik kepada mahasiswa khususnya anggota organisasi kami dengan cara memasukkannya kedalam kurikulum pengaderan kami. Sebagai contoh di Teknik UIM kami punya tahapan pengaderan yang mana didalamnya kami menekankan nilai demokrasi dalam pelaksanaannya.”³¹

Dalam wawancara lain dengan Fuad Sasmito selaku Anggota BEM Fakultas Teknik Unhas juga menjelaskan cara konkrit yang dilakukan lembaga kemahasiswaan dalam menerapkan pendidikan politik dengan menyisipkan nilai kedalam proses kaderisasi. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“Proses kaderisasi kami lakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas terlebih dahulu dengan semua elemen organisasi. Sedikit banyak di dalam proses kaderisasi tersebut juga memberikan pendidikan politik pada anggota kami. Semisal, kami biasanya memberikan materi kemahasiswaan yang didalamnya berbicara menyangkut posisi mahasiswa dalam bernegara dan hal yang harus dilakukan mahasiswa sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah.”³²

Dari pernyataan diatas menunjukkan usaha lembaga kemahasiswaan dalam menerapkan pendidikan politik kepada anggotanya dalam internal

³¹ Wawancara dengan Rachmat Arwinata anggota BEM Fakultas Teknik UIM. Tanggal 10 Juni 2023

³² Wawancara dengan Fuad Sasmito anggota BEM Fakultas Teknik Unhas. Tanggal 28 Juni 2023

organisasi. Hal ini dilakukan lembaga kemahasiswaan mengingat pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa. Pendidikan politik ini sangat penting adanya mengingat perlunya keterampilan interaksi dan komunikasi dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah lepas dari adanya tindakan politik sebagai upaya interaksi dan komunikasi politik tersebut. Maka dari hal tersebut, potensi politik yang dimiliki mahasiswa sangat perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan pendidikan politik di organisasi.

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan adalah untuk memberikan pemahaman politik pada mahasiswa non-FISIP sehingga memiliki kesadaran terhadap politik atau dengan kata lain melek politik. Adapun pendidikan politik ini ditujukan selain untuk mahasiswa secara umum, namun lebih utama adalah untuk pengembangan pemahaman politik bagi kader-kader dari organisasi tersebut. Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan organisasi bagi kader-kader organisasi selama masih menjadi anggota aktif dari organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengatur tentang keanggotaan organisasi. Peraturan ini ditujukan sebagai langkah regenerasi kader agar tidak terjadi kebuntuan kader dalam organisasi.

5.2.2 Membuat Kegiatan Menumbuhkan Semangat Demokrasi.

Aktivitas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam berorganisasi sangat bermanfaat dan memiliki kebergunaan yang efektif, dan untuk

mewujudkan hal tersebut secara maksimal diperlukan keaktifan mahasiswa untuk lebih membuka wawasan, kemampuan, dan skill mereka tidak hanya melalui pembelajaran kuliah di kampus semata, melainkan melalui kegiatan, keaktifan dan aktivitasnya di dalam berorganisasi (dalam hal ini organisasi kemahasiswaan), hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pendidikan politik mahasiswa sehingga dari pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik. Menimbang peran mahasiswa dalam merubah wajah pendidikan politik bangsa ini, jelas merupakan sesuatu yang sangat beralasan. Sebab, mahasiswa memiliki peran tersendiri dalam upaya mewujudkan pendidikan politik yang lebih baik dan moral dari apa yang tampilkan para politisi bangsa ini.

Karena mahasiswa memiliki peran sosial sebagai *agent of change*; *agent of modernizing*; *agent of control* atau meminjam istilah Nurcholish Madjid mahasiswa adalah "*the nation's is the best human material*".³³ Maka tentu peran mahasiswa dalam mewujudkan pendidikan politik yang bermoral menjadi sangat penting. Dalam konteks pendidikan politik ini mahasiswa secara umum mendapatkan pendidikan politik formal di bangku kuliah terlebih lagi yang mengambil konsentrasi politik sebab teori-teori umum politik telah diajarkan secara kontiniu. Kemudian, pendidikan politik ini juga diperkuat lagi dengan

³³ Nurcholis Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan. (Bandung: Mizan, 2008). Hal. 179-180

adanya lembaga-lembaga organisasi kampus, yang sepenuhnya mahasiswa di dalamnya dapat mengekspresikan politiknya.

Pada prinsipnya, terdapat sejumlah kegiatan-kegiatan yang didesign sebagai sarana pembelajaran untuk memberikan pengetahuan tentang politik kepada mahasiswa yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan antara lain: Pelatihan Demokrasi, Latihan Kepemimpinan, Kajian rutin tentang isu-isu sosial dan masih banyak lagi bentuk pendidikan politik yang lain yang sering dilakukan dalam organisasi kemahasiswaan bagi mahasiswa non-FISIP. Bentuk nyata yang dilakukan mayoritas organisasi mahasiswa non-FISIP dari hasil temuan dilapangan dalam penelitian ini adalah organisasi kemahasiswaan non-FISIP fokus pada pembentukan pemahaman tentang demokrasi kepada anggota organisasi.

Sikap demokratis merupakan perilaku yang harus kita terapkan dalam bernegara dan dianggap perlu dalam pembelajaran. Karena perilaku demokratis merupakan hal yang dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Pendidikan yang demokratis berarti melibatkan mahasiswa secara aktif dalam seluruh proses pendidikannya (studentcentered- student active learning). Bukan sebaliknya, berpola top down, yakni berpusat pada guru (teacher centered). Proses pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan demokrasi inilah yang menjadikan pendidikan bernuansa humanis. Sebagai wadah pengembangan

kompetensi, organisasi kemahasiswaan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan kesadaran politik. Hal ini akan membantu para anggotanya dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam meningkatkan sikap demokratis.

Secara keseluruhan, bentuk organisasi kemahasiswaan dalam membentuk sikap demokratis dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dapat membantu para anggotanya dalam meningkatkan sikap demokratis melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Selain itu, organisasi kemahasiswaan menerapkan pelaksanaan praktik demokrasi yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam organisasi itu sendiri, seperti pemilihan pemimpin yang transparan, pengambilan keputusan melalui musyawarah, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggotanya. Ini dijelaskan dari hasil penelitian dilapangan, dalam wawancara dengan Reski selaku Wakil Presiden BEM FKM Unhas menjelaskan:

“Pemahaman tentang demokrasi akan menumbuhkan kehidupan demokrasi, dan pengetahuan tentang demokrasi akan mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. nilai-nilai demokrasi tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui suatu proses transformasi, dan pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah

proses transformasi nilai-nilai yang membangun sikap mental serta kualitas pribadi bangsa untuk dapat berpikir lebih handal.”³⁴

Para anggota organisasi kemahasiswaan juga dapat belajar dan memahami demokrasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi, baik yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi maupun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Mahasiswa seharusnya diberikan kesempatan agar dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengambil keputusan, membuat rencana, dan berkontribusi dalam melaksanakan rencananya pendidikan demokrasi sangat mutlak diperlukan bagi mahasiswa agar mampu berperilaku demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hasil penelitian ini dikuatkan dengan pendapat Adrian selaku ketua BEM Fakultas Pertanian UIN Alauddin yang menjelaskan :

“Nilai-nilai demokrasi dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi misalnya toleransi, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat orang lain”³⁵

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan non-FISIP mengembangkan pendidikan politik dalam bentuk yang paling dasar sesuai dengan pemahaman mereka. Berbeda dengan lembaga

³⁴ Wawancara dengan Rere Wakil Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Tanggal 22 Juni 2023

³⁵ Wawancara dengan Adrian ketua BEM Fakultas Pertanian UIN Alauddin. Tanggal 7 Juni 2023

kemahasiswaan dalam ranah FISIP yang memahami dan menerapkan bentuk pendidikan politik secara luas sesuai dengan arti dari pendidikan politik. Organisasi Kemahasiswaan non-FISIP berpikir sederhana pada tataran pemahamannya menyangkut pendidikan politik yang berorientasi pada kata demokrasi.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini, dibahas dua hal yakni kesimpulan dan saran. Keduanya akan diuraikan lebih lanjut.

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menekankan pada strategi organisasi kemahasiswaan non-FISP di kota Makassar dalam melakukan pendidikan politik. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang pemahaman mahasiswa non-FISP menyangkut pendidikan politik serta bentuk pengembangan pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan non-FISP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan dua aspek pokok dalam penjelasan isi penelitian ini.

Pertama, pemahaman akan pendidikan politik oleh anggota organisasi kemahasiswaan non-FISP. Dimana dijelaskan bahwa pemahaman mahasiswa non-FISP tentang pendidikan politik itu berkaitan dengan politik dalam konteks praktis yang tidak jauh dari politik elektoral dan kata demokrasi. Pemahaman mayoritas mahasiswa non-FISP tentang pendidikan politik sangat simpel berbeda dengan arti dari pendidikan politik yang sebenarnya. Pendidikan politik memiliki makna yang lebih luas. Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran

politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, organisasi kemahasiswaan non-FISIP mengembangkan pendidikan politik dalam bentuk yang paling dasar sesuai dengan pemahaman mereka. Berbeda dengan lembaga kemahasiswaan dalam ranah FISIP yang memahami dan menerapkan bentuk pendidikan politik secara luas sesuai dengan arti dari pendidikan politik. Organisasi Kemahasiswaan non-FISIP berpikir sederhana pada tataran pemahamannya menyangkut pendidikan politik yang berorientasi pada kata demokrasi.

6.2 Saran

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Organisasi kemahasiswaan khususnya organisasi non-FISIP harus mengembangkan literasinya tentang pendidikan politik lebih luas dan dalam lagi. Sehingga pemahaman tersebut dapat secara nyata teraktualisasi dalam kerja organisasi.
2. Organisasi kemahasiswaan khususnya mahasiswa non-FISIP harusnya memfokuskan pendidikan politik dalam setiap gerak organisasi mengingat begitu pentingnya pemahaman politik dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan.

3. Penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian yang lain dengan fokus penelitian yang berbeda khususnya menyangkut kesadaran mahasiswa non-FISIP terhadap politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kosasih, Djahiri. 1995. *Dasar Umum Metodologi Pengajaran Pendidikan. Nilai Moral*. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP-IKIP Bandung.
- Abdullah, Jalaluddin. (2013). *"Filsafat Pendidikan."* Depok: Rajagrafindo Persada.
- Abdurrahman, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Bineka Cinta.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Affandi, F. N. (n.d.). (2011). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*.
- Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Yogyakarta; PT. Gramedia Pustaka utama.
- Arifin, Anwar. (2003). *"Komunikasi Politik: Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia"*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik RI. Makassar dalam Angka tahun 2023.
- Batubara, Harmen. (2015). *"Strategi Sun Tzu Memenangkan Pilkada"*. CV Garuda Mas Sejahtera..
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Freire, Paulo. (1999). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. (Prihantoro, Agung & Arif Fuad Fudiyartanto, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Gosul, Nursandrawali Gosul. 2019. *Peran Komunitas Literasi dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus Komunitas Literasi Kampng Buku Innawa Makassar)*. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Kahin. (1980). *"Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia"*. London: Cornell University Press.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Kartono. Kartini. 1996. *Pemimpin dan Kepimpinan*. CV. Rajawali.
- Kavang, Dannis. 1998. *Political Culture*. Armico: Bandung.
- Khadir, Abdul. (2012). *"Dasar-dasar Pendidikan."* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Madjid, Nurcholis. 2008. *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Mizan: Bandung.
- Maksum, Ali. Luluk Yunan Ruhendi. (2004). *"Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Postmodern, Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita"*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudyahardjo, Redja. (2002). *"Filsafat Ilmu Pendidikan."* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Mulyana, Rohmat. (2011). *"Mengartikulasikan Pendidikan Nilai "*. Bandung: Alfabeta.

- Rahman, Ayu Sri. 2014. *Pendidikan Politik Mahasiswa melalui Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Sitorus, L.M. (1974). *“Sejarah pergerakan Kebangsaan Indonesia.”* Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudiyo. (2002). *“Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Adicita Karya Nusa: Yogyakarta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Winardi. 2011. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yarger, Harry R Harger. 2006. *Teori Strategis untuk Abad 21: Buku Kecil tentang Strategi Besar*. Strategic Studies Institute.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Salsabila Aisyah anggota BEM Hukum UIN



Rachmad Ariwinata anggota BEM Teknik UIM



Reka Hafidz anggota BEM FK Unhas



Fuad Sasmito anggota BEM Teknik Unhas



Rere Wakil Presiden BEM FKM Unhas



Adrian Ketua BEM Fakultas Pertanian UIN Alauddin



Andi fauzan anggota BEM ekonomi upri